

**BAGIAN ANGGARAN 013
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
ESELON 1 : 05
DITJEN PEMASYARAKATAN**



LAPORAN KEUANGAN

**LAPAS KELAS IIB BOALEMO
(497852)**

**PERIODE SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2023**

*JL. PROF. DR. SAMIN RADJIK NUR. SH, TILAMUTA, KAB. BOALEMO
TELP.(0435) 210711 EMAIL : lpboalemo@gmail.com*

LAPAS KELAS IIB BOALEMO

Untuk Periode 30 Juni Tahun 2023

*Jl. Prof. Dr. Samin Rajik Nur, SH..Tilamuta, Kabupaten Boalemo
Provinsi Gorontalo*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Lembaga Pemasyarakatan

Giyono, A.Md.IP, SH., MH
NIP 197010281995031001

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	21
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	26
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	33
F. Pengungkapan Penting Lainnya	34
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BOALEMO
Jl. Prof. Dr. Samin Rajik Nur, SH..Tilamuta– Boalemo
Telp. (0443) 210711, Fax. (0443) 210710
Email : lpboalemo@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Boalemo Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo tingkat satker yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran
Kepala Lembaga Pemasarakatan

Giyono, A.Md.IP, SH., MH
NIP 197010281995031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Lembaga Masyarakat Kelas IIB Boalemo Bulan Desember Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023

Realisasi Pendapatan Negara periode Januari s/d Juni TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 10.200.672,- .

Realisasi Belanja Barang pada Bulan Juni TA 2023 adalah sebesar Rp 10.200.672,- atau mencapai 59 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 17.294.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Juni 2023

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp.12.832.093.184,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.375.223.672,- dan Aset Tetap (neto) sebesar Rp.12.451.798.492,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp Rp. 12.832.093.184,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai

dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 1.158.421, sedangkan jumlah beban operasional sebesar Rp.3.612.165.544, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(3.601.857.493). Kegiatan Non Operasional mengalami surplus sebesar Rp.1.158.421. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(3,600.699.072).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp 12.842.850.830,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(3.532.185.986,-) kemudian ditambah Penyesuaian Nilai Aset sebesar Rp0.dan Transaksi antar entitas sebesar 3.283.751.218,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp. 12,618,959,522,-

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Bulan Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPAS KELAS IIB BOALEMO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JULI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% th Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	17.294.000	10.200.672	58,98	11.586.620
JUMLAH PENDAPATAN		17.294.000	10.200.672	58,98	11.586.620
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	3.665.070.000	2.220.161.505	60,58	1.904.257.362
Belanja Barang	B.4	2.599.894.000	1.073.790.385	41,30	1.213.198.895
Belanja Modal	B.5	-	-	-	99.861.400
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		6.264.964.000	3.293.951.890	52,58	3.217.317.657

II. NERACA

NERACA

PER 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	30-Jun-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	60.000.000	0
Piutang Bukan Pajak	C.2	1.265.800	1.158.421
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.3	-	(5.792)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.4	1.265.800	1.152.629
Persediaan	C.5	313.957.872	363.179.432
Persediaan yang Belum Diregister	C.6	-	-
Jumlah Aset Lancar		375.223.672	364.332.061
ASET TETAP			
Tanah	C.7	2.572.593.000	2.572.593.000
Peralatan dan Mesin	C.8	5.933.100.827	5.933.100.827
Gedung dan Bangunan	C.9	10.338.378.000	10.338.378.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.10	(6.392.273.335)	(6.359.164.215)
Jumlah Aset Tetap		12.451.798.492	12.484.907.612
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.11	68.878.960	68.878.960
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(63.807.940)	(63.807.940)
Jumlah Aset Lainnya		5.071.020	5.071.020
JUMLAH ASET		12.832.093.184	12.854.310.693
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada pihak ketiga	C.13	243.482.758	11.459.863
Uang yang belum ditagih	C.14	33.828.550	
Uang muka dari KPPN	C.15	60.000.000	
JUMLAH KEWAJIBAN		337.311.308	11.459.863
EKUITAS DANA			
Ekuitas	C.16	12.494.781.876	12.842.850.830
JUMLAH EKUITAS DANA		12.494.781.876	12.842.850.830
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.832.093.184	12.854.310.693

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	10.308.051	11.210.939
JUMLAH PENDAPATAN		10.308.051	11.210.939
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.463.644.263	2.387.422.575
Beban Persediaan	D.3	190.032.560	154.271.160
Beban Barang dan Jasa	D.4	653.841.825	939.707.339
Beban Pemeliharaan	D.5	213.292.668	139.207.774
Beban Perjalanan Dinas	D.6	89.372.000	74.315.931
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	1.988.020	524.335.585
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	(5.792)	(3.854)
JUMLAH BEBAN		3.612.165.544	4.219.256.510
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.601.857.493)	(4.208.045.571)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.158.421	1.755.932
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.158.421	1.843.932
Beban dari kegiatan non operasional lainnya		-	88.000
PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		1.158.421	1.755.932
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.158.421	1.755.932
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(3.600.699.072)	(4.206.289.639)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	30-Jun-22
EKUITAS AWAL	E.1	12.842.850.830	13.491.405.235
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(3.600.699.072)	(4.206.289.639)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(31.121.100)	
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	24.543.460	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.5	(55.664.560)	-
LAIN-LAIN		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	3.283.751.218	3.205.731.037
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(348.068.954)	(1.000.558.602)
EKUITAS AKHIR	E.6	12.494.781.876	12.490.846.633

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Boalemo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo mulai beroperasi sejak tanggal 28 Juli tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI. No. 01.02 – PR.07.03 Tahun 2007 dan berada di kota Tilamuta Ibu kota Kabupaten Boalemo. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo merupakan Unit Pelaksana Teknis dibidang Pemasyarakatan yang mempunyai wilayah kerja meliputi Kabupaten Boalemo, serta bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo.

Tugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas Pemasyarakatan Narapidana / anak didik yakni, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan prasarana, mengelolahkan kerja, melakukan bimbingan sosial / kerohanian Narapidana / Anak Didik, melakukan pembinaan Narapidana / Anak Didik / Tahanan, melakukan pemeliharaan Keamanan dan Tata Tertib, serta melakukan Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Pembagian tugas sampai habis dapat dilihat pada struktur organisasi, menuntut kepada setiap pegawai dapat berperan secara aktif dan maksimal yang saling menunjang dalam tujuan organisasi.

Pimpinan dalam kapasitasnya sebagai koordinator, komunikator, stabilisator, sekaligus sebagai pengawas dengan memanfaatkan segala potensi yang ada, sehingga sasaran / tujuan organisasi dapat tercapai dengan maksimal

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo mempunyai tugas dan fungsi dalam dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo berkomitmen dengan visi **“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.

- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Juni Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Boalemo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Juni Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum

kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp. 7.542.251,- terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak.

B.2. Belanja

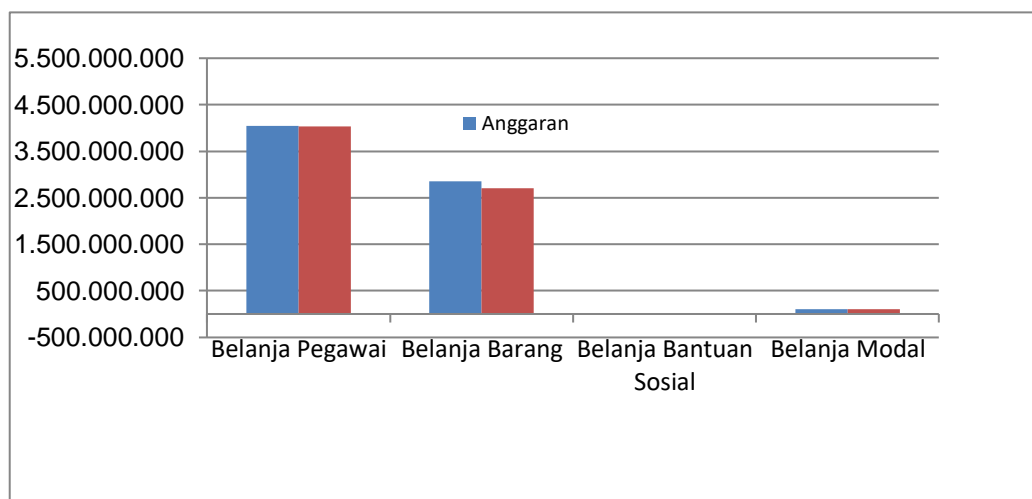
Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp. 3.293.951.890,- atau 52,58 % dari anggaran belanja sebesar Rp. 6.264.964.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja 30 Juni TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	3.665.070.000	2.220.161.505	60,58
Belanja Barang	2.599.894.000	1.073.790.385	41,30
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00
Belanja Modal	0	0	0,00
Total Belanja Kotor	6.264.964.000	3.293.951.890	52,58
Pengembalian Belanja	-		
Total Belanja	6.264.964.000	3.293.951.890	52,58

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	2.220.161.505	1.904.257.362	16,59
Belanja Barang	3.293.951.890	1.213.198.895	171,51
Belanja Modal	-	99.861.400	(100,00)
Jumlah	5.514.113.395	3.217.317.657	71,39

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja 30 Juni 2023 TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 71,39 % disebabkan oleh adanya Kenaikan Pagu Anggaran Belanja Barang dan Pegawai serta adanya Pagu Belanja Modal di tahun 2023.

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.220.161.505,- dan Rp. 1.904.257.362 Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni TA 2023 Kenaikan sebesar 71,39% dari Realisasi Belanja Pegawai TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh Pagu Anggaran yang mengalami Kenaikan di Tahun 2023

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.293.951.890,- dan Rp.1.213.198.895 Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2023 Kenaikan sebesar 171,51 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya Kenaikan pagu anggaran Belanja Barang di Tahun 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2022 30 Juni 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	481.420.691	1.607.000.000	(70,04)
Belanja Barang Non Operasional	71.765.350	291.710.000	(75,40)
Belanja Barang Persediaan	127.303.600	174.682.000	(27,12)
Belanja Jasa	92.498.676	275.460.000	(66,42)
Belanja Pemeliharaan	215.700.068	371.580.000	(41,95)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	85.102.000	274.116.000	(68,95)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			
Jumlah Belanja Kotor	1.073.790.385	2.994.548.000	(64,14)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	1.073.790.385	2.994.548.000	(64,14)

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.99.861.400,- dan Rp0,- Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	99.861.400	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	99.861.400	-100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	99.861.400	-100,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.99.861.400 Tidak terdapat realisasi Belanja modal Tanah pada 30 Juni TA 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni TA 2023 adalah sebesar Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
0	0	0,00
0	0	0,00
0	0	0,00
-	-	0,00
0	0	0,00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.0 dan Rp.0.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak terdapat Kas di Bendahara Penerimaan untuk periode yang berakhir per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar masing-masing Rp.26.171.450 dan Rp.0.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 dan 30 Juni 2023 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.0.. dan Rp.0. Piutang PNBP masing-masing adalah sebesar Rp1.265.800. dan Rp.1.152.629 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut :

Uraian	30-Jun-23	30-Jun-22
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	1.265.800	1.152.629
Jumlah	1.265.800	1.152.629

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing adalah sebesar Rp363.179.432 dan Rp 280.509.982. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jenis	30-Jun-23	2022
Barang Konsumsi	192.459.372	193.307.822
Amunisi	96.099.500	96.099.500
Bahan untuk Pemeliharaan	24.399.000	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan untuk berjaga-jaga	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	312.957.872	289.407.322

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Lembaga Masyarakat Kelas IIB Boalemo untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.2.572.593.000 dan Rp.2.572.593.000. Nilai Tanah berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak KPKNL Gorontalo Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	2.572.593.000
Mutasi tambah:	0
Penilaian Aset KPKNL	0
Mutasi Kurang:	
Penyitaan pengadilan	0
Saldo per 30 Juni 2022	2.572.593.000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	61,559	Jln.Prof.Dr.Samin Radjik Nur,SH	2,572,593,000
2			-
3			-
4			-
Jumlah			2,572,593,000

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp. 5.933.100.827 dan Rp. Rp.6.000.260.045

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	5.933.100.827
Mutasi tambah:	
Pembelian	
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	-
Penghentian dari penggunaan	-
Saldo per 30 Juni 2023	5.933.100.827
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	4.967.484.436
Nilai Buku per 30 Juni 2023	10.900.585.263

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp10.338.378.000 dan Rp.10.338.378.000.

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	10.338.378.000
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	10.338.378.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(1.253.000.571)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	9.085.377.429

C.17 Jalan, Irigasi dan Bangunan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp.68.878.960 dan Rp.423.853.795., sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	68.878.960
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
Saldo per 30 Juni 2023	68.878.960
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2023	(63.807.940)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	5.071.020

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Tidak adanya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk Satker (497852) Lapas Kelas IIB Boalemo untuk Tahun 2023.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing (Rp.63.807.940) dan (Rp. 403.602.754). Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.933.100.827	(4.967.484.436)	965.616.391
2	Gedung dan Bangunan	10.338.378.000	1.424.788.899	11.763.166.899
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	-	0
4	Aset Tetap Lainnya	68.878.960	(63.807.940)	5.071.020
Akumulasi Penyusutan		16.340.357.787	(3.606.503.477)	12.733.854.310

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah Rp.68.878.960 dan Rp. 423.853.795. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	68.878.960
Mutasi tambah:	
- reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi kurang:	
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
- penghapusan BMN	-
Saldo per 30 Juni 2023	68.878.960
Akumulasi Penyusutan	(63.807.940)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	5.071.020

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing (Rp.63.807.940) dan (Rp.396.846.901). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Bangku Panjang Besi/Metal	2.506.000	2.506.000	0
Televisi	16.830.000	16.830.000	0
P.C Unit	40.568.160	40.568.160	0
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8.974.800	8.974.800	0
Jumlah	68.878.960	68.878.960	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	68.878.960	68.878.960	0

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023 sebesar Rp.60.000.000 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 sebesar Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Tidak terdapat Nilai Pendapatan diterima di muka untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023. Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan pendapatan diterima di muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Tidak Terdapat Beban yang Masih Harus Dibayar untuk periode yang berakhir per 30 Juni 2023. Beban yang masih harus dibayar merupakan tunggakan pembayaran yang harus dibayarkan pada TA 2023 hal ini merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.842.850.830,- dan Rp.13.491.405.235,- Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.10.308.051, dan Rp.11.210.939. Pendapatan tersebut terdiri dari:

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan sewa tanah gedung bangunan	10.308.051	11.210.939	-8,76
Pendapatan Penjualan lainnya	-	-	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	0,00
JUMLAH	10.308.051	11.210.939	-8,76

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.2.463.644.263 dan Rp.3.387.422.575. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

URAIAN	30-Jun-23	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	2.390.548.000	2.386.548.000	0
Beban Pembulatan	60.000	57.000	5
Beban Tunj. Suami/istri	159.724.000	159.724.000	-
Beban Tunj. Anak	48.223.000	48.023.000	0
Beban Tunj. Struktural	68.070.000	68.070.000	-
Beban Tunj. Fungsional	168.870.000	168.870.000	-
Beban Tunj. PPh	3.384.000	3.356.000	1
Beban Tunj. Beras	116.683.000	106.683.000	9
Beban Uang Makan	689.953.000	704.184.000	(2)
Beban Tunjangan Umum PNS	10.150.000	10.150.000	-
Beban Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Beban Uang Lembur	9.405.000	9.405.000	-
JUMLAH	3.665.070.000	3.665.070.000	-

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.242.680.000,- dan Rp.154.271.160. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	226.414.932	154.271.160	46,76
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	16.266.000	88.000	-
Beban Amunisi	0	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	242.680.932	154.271.160	57,31

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 September 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp645.682.717,- dan Rp.841.092.846. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 dan 2021

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Beban keperluan perkantoran	74.511.000	162.512.407	-118,11
Beban Pengadaan bahan makanan	358.409.691	423.624.017	-18,20
Beban penambah daya tahan tubuh	23.400.000	34.848.000	-48,92
Beban barang operasional - penanganan covid-1	0	0	0,00
Beban Honor operasional satuan kerja	25.100.000	22.250.000	11,35
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0,00
Beban bahan	48.995.850	60.999.564	-24,50
Beban Honor Output Kegiatan	0	1.200.000	#DIV/0!
beban barang non operasional lainnya	22.767.500	55.652.500	-144,44
Beban jasa	92.498.676	80.006.358	13,51
Jumlah	645.682.717	841.092.846	-30,26

Beban barang dan jasa pada tahun 2023 mengalami Penurunan karena pagu anggaran untuk beban barang dan jasa pada tahun 2023 mengalami Penurunan.

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.215.700.068 dan Rp.162.975.118. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

URAIAN JENIS BEBAN	30-Des-22	31-Des-21	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	162.648.740	112.495.400	30,84
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	23.602.400	25.326.500	-7,30
Beban persediaan suku cadang	29.448.928	25.153.218	14,59
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	#DIV/0!
Jumlah	215.700.068	162.975.118	24,44

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.85.102.000,- dan Rp.71.555.931 Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 2022

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30/06/2023	30/06/2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	76.252.000	58.505.931	23,27
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.850.000	13.050.000	-47,46
Jumlah	85.102.000	71.555.931	15,92

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2023. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.6.456.081.275 dan Rp.6.549.959.770. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	30/06/2023	30/06/2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	4.967.484.436	4.892.827.475	2
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.424.788.899	1.253.000.571	0.38
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	528.970	(100)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	63.807.940	403.602.754	-
Jumlah Penyusutan	6.456.081.275	6.549.959.770	(1)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.456.081.275	6.549.959.770	(1)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan aset non lancar	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	
Jumlah Surplus/(defisit)pelepasan Aset Non Lancar	0	0	-
Pendapatan penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	
Beban penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	
Jumlah surplus /(defisit) penyelesaian kewajiban jangka panjang	0	0	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.158.421	1.755.932	
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	1.158.421	1.843.932	
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	88.000	
Jumlah surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	1.158.421	1.755.932	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.158.421	1.755.932	

D.12 Pos Luar Biasa

Tidak terdapat Nilai pada Pos Luar Biasa baik di Tahun 2023 maupun 2022.

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.842.850.830,- dan Rp. 13.491.405.235

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp(3,672,549,555) dan Rp(4,206,289,639). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

E.3.4 Koreksi Aset Reklasifikasi

Koreksi Aset Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.24.543.460 dan Rp.0 koreksi ini berasal dari kesalahan koreksi atas Gedung kantor ke tanah bangunan tempat kerja sehingga mengakibatkan penyusutan transaksi.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp.(55.664.560). Koreksi ini berasal dari

transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.283.751.218 dan Rp.3.205.731.037

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp.3.293.951.890,- sedangkan DKEL sebesar Rp.10.200.672

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp. 0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0-.

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.422.931.393 dan Rp.12.490.846.633

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Lembaga Masyarakat Kelas IIB Boalemo adalah

- Bank BRI KCP Talamuta a.n. BPG.180.LAPAS BOALEMO Nomor Rekening : 650924978521000

F.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

- - Belanja Barang Pesediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar Rp. 0

